

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia dalam menjalani kehidupannya tidak akan lepas dari masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan dan terikat oleh aturan tertentu. Seperti yang diungkapkan oleh Linton dalam Hartono dan Azis (1990: 89), bahwa “masyarakat adalah setiap kelompok manusia, yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.” Dari pendapat ahli tersebut dapat dikatakan bahwa manusia merupakan anggota dari masyarakat.

Seiring perkembangan zaman di dunia ini masyarakat akan selalu berubah. Masyarakat dapat dibedakan menjadi masyarakat yang ada di pedesaan dan di perkotaan. Masyarakat yang ada di perkotaan lebih cenderung cepat menerima informasi dan mudah menerima perubahan yang baru, berbeda dengan masyarakat pedesaan. Masyarakat yang hidup di pedesaan masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan seperti halnya gotong royong serta kebersamaan. Sedangkan masyarakat yang hidup di daerah perkotaan anggotanya cenderung bersifat individualis. Tetapi sekarang masyarakat pedesaan pun tidak sedikit pola tingkah lakunya seperti masyarakat perkotaan yang terbuka terhadap pengaruh dari luar dan bersifat individualis karena penyebab dari perubahan sosial itu sendiri yang ada di masyarakat.

Desa merupakan kesatuan masyarakat atau penduduk yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai yang tersurat dalam pasal 1(5) PP No.72 Tahun 2005. Begitupula dalam UUD 1945 yang telah menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara RI.

Pemilihan Kepala Desa yang biasanya sering disingkat dengan Pilkades mungkin bukanlah istilah yang asing lagi untuk saat ini. Sebagai wadah atau tempat untuk menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan desa pilkades diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa tertentu, untuk mengangkat calon yang layak sebagai kepala desa.

Pilkades merupakan salah satu instrumen dalam pembentukan pada pemerintahan modern dan demokratis. Pesta demokrasi yang dilakukan ditingkat wilayah terkecil ini pada dasarnya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan pemerintah tentang tata cara penyelenggaraan pilkades. Sehingga seluruh serangkaian tahapan-tahapannya mulai dari pembentukan sebuah panitia pilkades sampai pada pelantikan kepala desa terpilih diharapkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian proses pemilihan kepala desa akan berjalan dengan sangat baik tanpa mempengaruhi keutuhan masyarakat. Dan harapan masyarakat dapat terpenuhi untuk terpilihnya kepala desa yang baru dan

dinyatakan layak untuk memimpin dan menjalankan roda pemerintahan desa. Hal inilah yang didambakan oleh setiap masyarakat yang ada di desa tersebut demi terciptanya keadaan yang kondusif, aman dan terkendali.

Namun dalam praktek kenyataannya pilkades yang sudah diatur oleh perundang-undangan pemerintah untuk saat ini sangatlah sulit terselenggara dengan lancar dan berkualitas karena disebabkan bermainnya faktor-faktor kepentingan politik, kepentingan untuk ingin berebut kekuasaan ketimbang hakikat yang diinginkan oleh pilkades yaitu pemerintahan desa yang legitimate. Disamping itu penyelenggaraan pilkades juga tersentuh dan tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan.

Di dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini terdapat banyak masalah serta persoalan sebagai gejala awal konflik pilkades yang diwarnai dengan kericuhan, kekerasan, yang dapat merusak keutuhan dan eksistensi masyarakatnya. Situasi yang memprihatinkan ini tidak jarang lagi terjadi di berbagai daerah desa yang terdapat di tanah air Indonesia. Seperti misalnya yang terjadi tepatnya di Desa Mekarjaya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Proses pelaksanaan pilkades yang sering diwarnai dengan persaingan tidak sehat sampai akhirnya menuai konflik.

Desa Mekar Jaya adalah Dusun Olunga yang dipimpin oleh kepala dusun yang bernama Allmarhum bapak Karim Bone. Desa Mekar Jaya juga merupakan salah satu desa yang termasuk pemekaran dari desa Bongo Nol pada tahun 1985. Desa ini definitif pada tanggal 26 Januari 1986 dimana kepala pemerintahan pada saat itu adalah Allmarhum bapak Yasin Sado yaitu pada periode 1985 sampai 1989,

dan pada awal tahun 1990 sampai 1993 pemerintahan dikendalikan oleh Allmarhum bapak Ishak Suronoto. Kemudian pemerintahan dilanjutkan oleh Allmarhum bapak Daud Hasan pada tahun 1994 sampai 1995, pemerintahan bapak Daud Hasan ini hanya berlangsung selama 1 tahun. Selanjutnya pada tahun 1996 diadakan kembali pemilihan kepala desa pertama yaitu Allmarhum bapak Yasin Sado yang pemerintahannya berlangsung selama 2 tahun yakni pada tahun 1996 dan berakhir pada tahun 1998. Kemudian pada awal tahun 1999 Desa Mekar Jaya dipimpin oleh Allmarhum bapak Tasman Dangkoa sampai pada tahun 2001, selanjutnya diadakan kembali pemilihan kepala desa setelah pemerintahan sebelumnya berakhir karena pengunduran diri. Kemudian dilanjutkan oleh bapak Ali Igirisa sebagai kepala desa pada periode 2001 sampai 2005, setelah itu dilanjutkan kembali oleh bapak Musa Bone pada tahun 2006.

Pada tahun 2007 pemerintahan dipimpin oleh bapak Nirwan I.L Pambi sampai pada tahun 2013, ini merupakan masa pemerintahan kepala desa terlama selama desa ini berdiri. Selanjutnya pemerintahan di pimpin oleh bapak Fitsawal Kaharu pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2014. Kemudian pada periode tahun 2015 sampai 2016 dilanjutkan oleh bapak Lukman Amu yang saat ini sedang menjabat sebagai Camat Kecamatan Wonosari. Selanjutnya pemerintahan dipimpin oleh bapak Mohammad Yeni Abas pada periode 2016 sampai dengan tahun 2017. Kemudian dilanjutkan oleh bapak Mohammad Matoka namun hanya berlangsung selama kurang lebih 1 bulan lamanya hanya berselang berapa minggu saat pelantikan tiba-tiba beliau langsung mengundurkan diri sebagai kepala desa yang menimbulkan terjadinya konflik saat itu dan pemerintahan beliau

adalah pemerintahan tersingkat yang pernah tercatat saat ini. Selanjutnya sistem pemerintahan di lanjutkan oleh bapak Syamsul D. Nusi S.Pd pada periode 2017 sampai dengan 2018. Dan kemudian terpilih ibu Suwartin Adam S.Pd sebagai kepala desa pada periode 2017 hingga sekarang, Saat ini sudah 13 orang yang tercatat pernah memimpin desa Mekar Jaya.

Desa Mekar Jaya merupakan salah satu tempat yang melakukan pemilihan umum yang menuai terjadinya konflik ditengah-tengah masyarakatnya hingga saat ini. Pada pemilihan kepala desa pada saat itu ada dua orang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, Masing-masing calon mempunyai visi dan misinya tersendiri. Dalam hal ini masyarakat berhak memilih mana yang menurut mereka mampu menjadi pemimpin serta mampu mengayomi dalam memerintah, namun dalam prakteknya yang namanya politik sudah pasti ada masalah. Seperti halnya pada kampanye, dalam prosesnya kampanye merupakan hal yang lumrah terjadi sebelum pesta demokrasi dilaksanakan. Pada saat kampanye berlangsung temuan demi temuan pasti akan terlihat dengan jelas, semisalnya dengan cara memberi sesuatu dalam hal kepentingan hak suara baik berupa uang atau barang lain dan yang melakukannya adalah tim sukses masing-masing calon dan yang paling banyak memberi dialah yang menang, inilah kenyataan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Desa Mekar Jaya. Penyuaan dalam hak suara memang tidak diperbolehkan namun tidak dalam kampanye kepala desa yang ada di desa ini. Salah satu calon pun terpilih dengan cara ini namun pada saat menjelang waktunya untuk dilantik, kepala desa yang dilantik pada saat itu melarikan diri dan menyatakan sikap atas ketidaksiapannya untuk memimpin. Kemudian atas ketidaksiapannya

tersebut digantikan dengan kepala desa pengganti atau sementara, namun tidak lama kemudian diganti lagi dan saat ini yang menduduki sebagai kepala desa adalah seorang wanita yang saat ini system kinerja kerjanya dalam system pemerintahannya ada sebgaiian masyarakat yang tidak menyukainya.

Dalam hal ini kebudayaan bersinggungan dengan kepentingan politik. Sehingga masyarakat lupa diri akan pentingnya kekeluargaan dan kebudayaan demi kepentingan politik yaitu memenangkan calon mereka masing-masing dan berusaha untuk mengalahkan calon yang lain sebagai lawan politiknya. Situasi seperti ini mengundang penulis untuk mengulas dan mengkaji lebih mendalam. Apa sebenarnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Desa Mekar Jaya, sekaligus bagaimana penyelesaian konflik yang terjadi. secara khusus penulis juga ingin melihat bagaimana kebudayaan berperan didalamnya dalam hal mengatasi dan menyelesaikan konflik tersebut.

Penulis juga melihat terjadinya konflik sosial ini mempengaruhi pada semua aspek kehidupan sehari-hari masyarakat baik individu maupun masyarakat, yang secara keseluruhannya berdampak terhadap hubungan sosial masyarakat. bahkan hubungan diantara anggota masyarakat yang bersaudarapun dapat terpengaruh oleh keadaan tersebut, sehingga yang terjadi nilai yaitu kekeluargaan dan hubungan darah sudah luntur dan sangat memprihatinkan. Karena calon-calon yang ada pada dasarnya merupakan orang-orang yang masih ada hubungan kekerabatan dan kekeluargaan seperti yang terjadi tepatnya di Desa Mekar Jaya Kecamatan Wonosari, Hal inilah yang menjadi daya tarik sekaligus latar belakang sehingga penelitian sangat perlu dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana konflik pemilihan Kepala Desa di Desa Mekar Jaya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan tujuan penelitian Yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis konflik pemilihan Kepala Desa di Desa Mekar Jaya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo!''.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala berpikir bagi penulis dan pembaca, serta dapat menjadi salah satu bahan referensi.

2. Secara Praktis:

Sebagai bentuk sumbangan pemikiran, bagi peneliti sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat digunakan oleh peneliti ketika sudah hidup berkeluarga pada khususnya dan bermasyarakat pada umumnya, bagi masyarakat bermanfaat sebagai input (masukan) dalam menyelesaikan masalah bagi keluarga yang mempunyai permasalahan serupa dengan penelitian ini.